

## SERTIFIKAT LESTARI PT. DIAMOND RAY: ASET ATAU BEBAN?

AHMAD MARYUDI\*

Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta

### ABSTRACT

*Several environmental non-government organizations and green parties pursue various strategies to promote sustainable management of forest resource. Due to the increasing environment awareness of some segments of timber users, they have established a certification body and developed a set of criteria and indicators, against which the performance of participating forest companies will be assessed. Early experiences in Indonesia showed that certification received warm welcome from several forest companies, as there is no question that they saw the attraction of being certified. However, it appears that their enthusiasm was dampened by the experience of a certified company. Certification might have been seen as more of a liability than an asset as the economic benefits from market access became less clear, while the costs became more apparent. The use of rigid standards might result in "negative" responses from forest companies. More proactive approaches might encourage the companies to join certification.*

*Key word: forest, certification, asset, liability*

\*Alamat korespondensi: E-mail: maryudi76@yahoo.com

### PENDAHULUAN

Kepedulian terhadap isu-isu kerusakan hutan dan lingkungan meningkat tajam pada tiga dekade terakhir. Semenjak awal dekade 1980an, secara konstan muncul kampanye-kampanye boikot terhadap kayu tropis yang dianggap berasal dari hutan yang tidak dikelola dengan baik (lihat Poore, 2003). Kampanye-kampanye tersebut telah memunculkan "environment-related hysteria" (Ottman, 1998), yang secara nyata mampu mempengaruhi kondisi psikologis sebagian konsumen kayu untuk semakin peka dan peduli terhadap kerusakan lingkungan (Rosenbaum, 1995). Pada akhir 1980-an, konfigurasi strategi para penggiat lingkungan dalam upaya mempengaruhi agenda politik kehutanan dan lingkungan semakin beragam, tidak terbatas pada boikot produk kayu. Sebagian dari mereka dan kelompok-kelompok "hijau" lainnya mulai mencoba

menggunakan wahana yang lebih lunak yaitu dengan menggunakan instrumen-instrumen berbasis pasar (Cashore, 2002; Rametsteiner dan Simula, 2003). Belakangan, mereka mendorong konsumen untuk hanya membeli produk-produk dengan label hijau.

Kecenderungan pelabelan terhadap suatu produk yang muncul di beberapa sektor, khususnya label produk makanan, nampaknya memberi ilham bagi sebagian penggiat lingkungan dan kehutanan untuk memunculkan sertifikasi hutan. Mereka mendirikan lembaga sertifikasi, *Forest Stewardship Council* (FSC) dan mengembangkan satu set kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari. Kinerja perusahaan yang mengajukan sertifikat lestari akan dinilai berdasarkan standar tersebut (Upton dan Bass, 1995). Sering dikatakan bahwa keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan hutan yang berpartisipasi adalah suatu anggapan yang menyatakan bahwa

partisipan tidak merusak hutan, yang diharapkan bisa memberikan keuntungan komparatif *vis a vis* non-partisipan (Gunningham dan Sinclair, 2002; Rametsteiner dan Simula, 2003). Oleh karena itu, partisipan diharapkan akan bisa mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan harga premium untuk produk mereka (Upton dan Bass, 1995) karena dipercaya bahwa beberapa segmen pasar di negara-negara maju hanya akan membeli produk bersertifikat dan bahkan dengan harga yang lebih tinggi dibanding produk serupa tanpa sertifikat lestari (Ozanne dan Vlosky, 1997; Ozanne dan Smith, 1998; Forsyth *et al.*, 1999).

#### PERKEMBANGAN SERTIFIKASI HUTAN ALAM DI INDONESIA

Cashore *et al.* (2004) mengajukan hipotesis bahwa suatu negara yang *export-dependent*, di mana sebagian besar produk kayu yang dihasilkan diekspor ke negara lain, akan terdorong untuk mengadopsi sertifikasi hutan, khususnya *internationally recognized schemes* yang didukung oleh kalangan penggiat lingkungan, seperti FSC. Hal ini didasarkan pada dugaan bahwa ada semacam kekhawatiran akan hilangnya daya saing produk kayu mereka *vis-à-vis* dengan produk saingan.

Menjelang masuknya milenium baru, kebenaran hipotesis tersebut mulai terlihat di Indonesia. Beberapa perusahaan hutan di Indonesia berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi lestari dan memperbaiki kinerja mereka untuk mencapai *benchmark* yang disyaratkan. Nampaknya, gairah tersebut disebabkan adanya janji-janji bahwa sertifikasi hutan mampu memberikan citra yang baik yang akan mendorong diperolehnya akses pasar yang lebih baik dan dengan harga premium. Beberapa diantara mereka telah dinilai kelayakannya oleh lembaga sertifikasi tertentu (lihat Purbawiyatna *et al.*, 2004).

Pada tahun 2000, PT. Diamond Raya Timber (DRT), mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHL) yang dikeluarkan secara bersama oleh FSC dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).<sup>1</sup>

Namun, sertifikasi PT. DRT tersebut menuai berbagai protes, terutama dari kalangan penggiat lingkungan. Dengan dikeluarkannya sertifikat PHL bagi suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut dinyatakan telah mengelola hutan sesuai dengan prinsip kelestarian hutan. Banyak yang menuduh sertifikasi ini cukup terburu-buru, bahwa PT. DRT senyatanya “tak se hijau labelnya”. PT. DRT dianggap belum mencapai *benchmark* sertifikasi FSC-LEI karena beberapa kriteria kelestarian hutan belum dipenuhi (lihat Valentinus dan Counsell, 2002). Perusahaan tersebut dianggap masih melakukan beberapa pelanggaran terhadap prinsip dan kriteria yang dikembangkan oleh FSC. Bahkan beberapa pemerhati menyampaikan keberatan resmi kepada FSC (*RainForest Foundation* dan WALHI, 2001).

Pengalaman PT. DRT ini dipandang telah merugikan kampanye lingkungan dan promosi sertifikasi hutan di kalangan perusahaan hutan. Menjadi pioneer dalam sertifikasi, sorotan publik terhadap PT. DRT justru semakin tajam (*increased scrutiny*) (Maryudi, 2005). Akibat mendapatkan sertifikasi, PT. DRT harus menanggung beban yang cukup berat, karena beberapa kekurangan perusahaan, yang mungkin dipandang (oleh pemberi sertifikat) tidak terlalu nyata dalam keseluruhan penilaian, justru terpublikasi. Sebuah kontradiksi dengan janji-janji bahwa sertifikasi akan meningkatkan citra perusahaan yang bisa memberikan keunggulan kompetitif yang dikatakan akan bermuara pada insentif pasar, baik akses pasar yang lebih baik

1. LEI adalah sebuah perusahaan pengembang sistem sertifikasi nasional di Indonesia

maupun harga premium. Pada saat insentif pasar yang dijanjikan belum nampak, sementara biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi, yang mencakup biaya pengajuan lamaran dan biaya untuk memperbaiki kinerja untuk mencapai *benchmark* yang disyaratkan lembaga sertifikasi, merupakan sebuah keniscayaan, sertifikasi tidak mampu mengurangi tekanan yang harus ditanggung perusahaan dari kampanye-kampanye lingkungan. Fakta inilah yang diduga menurunkan gairah perusahaan hutan lainnya untuk melakukan proses sertifikasi.

Dalam kasus PT. DRT, FSC-LEI sebenarnya memainkan strategi yang cukup menarik dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik di Indonesia. Mereka mempertimbangkan kualitas pengelolaan hutan secara umum di Indonesia yang masih jauh dari pengelolaan lestari, sehingga tidak mungkin mengharapkan secara penuh sesuai dengan prinsip dan kriteria kelestarian yang mereka kembangkan. Nampak jelas bahwa lembaga sertifikasi (FSC-LEI) menghargai komitmen dan usaha PT. DRT untuk terus memperbaiki kinerjanya menuju kualitas pengelolaan yang jauh lebih baik. Hal ini tercermin dalam komentar Heiko Leideker (Direktur Eksekutif FSC), yang menyatakan bahwa PT. DRT selama ini dianggap sebagai salah satu pemegang HPH yang progresif di Indonesia, namun bukan berarti bahwa perusahaan ini bebas dari kekurangan (lihat van Assen, 2005). Nampaknya, tujuan FSC memberikan sertifikat PHL kepada perusahaan ini adalah untuk menumbuhkan minat perusahaan lain untuk melakukan sertifikasi hutan.

## PENUTUP

Filosofi kelestarian hutan, walaupun sudah sering didefinisikan harus terbangun di atas 3 pilar utama (ekonomi, sosial dan lingkungan), sering diinterpretasikan dan dimaknai secara berbeda. Kadangkala

ada perbedaan yang sangat nyata dalam menterjemahkan ketiga pilar kelestarian tersebut. Demikian juga, sebuah sertifikat kelestarian (dan sistem penilaian serta *benchmark* yang digunakan lembaga sertifikasi) dimaknai secara berbeda pula. Mungkin ada harapan-harapan cukup tinggi terhadap PT. DRT, bahwa perusahaan ini “benar-benar layak lestari”, karena lembaga pengeluar sertifikat (FSC) dikenal mengembangkan standar yang cukup tinggi (*prescriptive*). Sebuah hal yang cukup wajar terutama jika mengingat pada saat PT. DRT mendapat sertifikat kelestarian, isu sertifikasi relatif masih *fresh from the oven*. Namun, lembaga pemberi sertifikat nampaknya mempunyai justifikasi-justifikasi lain, tidak sebatas pada standar yang dimaksud.

Mungkin perlu disadari bahwa kualitas pengelolaan hutan di Indonesia secara umum belum memuaskan kalau tidak dikatakan masih sangat buruk. Oleh karena itu, penerapan standar sertifikasi yang kaku bisa menimbulkan resistensi dari para pengelola hutan. Belakangan, sering disarankan untuk memilih langkah proaktif dengan berkerja lebih erat dengan perusahaan hutan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan hutannya. Selain itu perlu pula prosedur sertifikasi secara bertahap (*phased approach*) untuk perusahaan hutan yang kualitas pengelolaan hutannya relatif tertinggal (lihat Fischer *et al.*, 2005; ITTO, 2005; PEFC, 2006). Dengan pendekatan ini, perusahaan hutan masih dimungkinkan untuk mendapatkan rekognisi dengan *interim certificate* dengan target capaian tertentu dalam rentang waktu tertentu, sebelum mendapatkan sertifikasi penuh. Pendekatan ini diharapkan bisa mendorong perusahaan hutan untuk mengadopsi sertifikasi, sehingga keinginan agar sertifikasi mampu mendorong *improved forest management* bisa diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cashore, B. 2002. Legitimacy and the privatization of environmental governance: how non-state market-driven (NSMD) governance systems gain rule-making authority, *Governance*, 15 (4): 503-529.
- Cashore, B., Auld, G. & Newsom, D. 2004. *Governing Through Markets: Forest certification and the emergence of non-state authority*, Yale University Press, New Haven&London.
- Fischer, C., Aguilar, F., Jawahar, P. & Sedjo, R. 2005. *Forest Certification: Toward Common Standards?* Discussion Paper 05-10. April 2005. Resources for the Future, Washington, D.C.
- Forsyth, K, Haley, D. dan Kozak, R. 1999. Will consumers pay more for certified wood products? *Journal of Forestry*, 99 (2): 18-22.
- International Tropical Timber Organization (ITTO). 2005. *ITTO International Workshop on Phased Approaches to Certification*. 19-21 April 2005. Diakses dari: [www.itto.or.jp/live/Live\\_Server/969/Main-Report.pdf](http://www.itto.or.jp/live/Live_Server/969/Main-Report.pdf) (23 Februari 2006)
- Gunningham, N. & Sinclair, D. 2002. *Leaders and Laggards: Next Generation Environmental Regulation*, Greenleaf, Sheffield.
- Maryudi, A. 2005. *Politics within Markets: Convergence and divergence in Indonesian and Malaysian forest certification governance*. Thesis Master. Tidak dipublikasikan. School of Resources, Environment and Society, the Australian National University. Canberra.
- Ottman, J.A. 1998. *Green Marketing: Opportunities for innovation*. 2<sup>nd</sup> Ed. NTC Business Books. Chicago.
- Ozanne, L.K. & Vlosky, R.P. 1997. Willingness to pay for environmentally certified wood products: a consumer perspective, *Forest Products Journal*, 47 (6): 39-48.
- Ozanne, L.K. & Smith, P. 1998. Segmenting the market for environmentally certified wood products, *Forest Science*, 44 (2): 379-389.
- Poore, D. 2003. *Changing Landscape: The development of the International Tropical Timber Organization and its influence on tropical forest management*, Earthscan Publication Ltd. London.
- Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 2006. *The PEFC Council's position towards the phased approach to certification*. Lembar Posisi. Diakses dari: [www.pefc.org/internet/resources/5\\_1177\\_1270\\_file.1449.pdf](http://www.pefc.org/internet/resources/5_1177_1270_file.1449.pdf) (23 Februari 2006)
- Purbawiyatna, A., Suntana, A.S., Muhtaman, D.R., Asycarya, D., Riva, W.F., Dewi, I.S., Bayunanda, A., Simanjuntak, L., Sugianto, Hendrawati, D., Abimanyu, B.M., Ferry & Hardiyanto, G. 2004. *Memoar Satu Dekade Pergulatan Sertifikasi di Indonesia: Dari formasi ke transformasi Lembaga Ekolabel Indonesia*, Pustaka LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia, Bogor.
- RainForest ' Foundation and WALHI. 2001. *Complaint Concerning Certification of PT. Diamond Raya (SGS Project No. 6489 ID)*. Diakses dari: [www.rainforestfoundationuk.org/files/PTDR\\_complaint\\_2001.pdf](http://www.rainforestfoundationuk.org/files/PTDR_complaint_2001.pdf) (8 Juni 2005)
- Rametsteiner, E. & Simula, M. 2003. Forest certification-an instrument to promote sustainable forest management?, *Journal of Environmental Management*, 67: 87-98.
- Rosenbaum, W.A. 1995 *Environmental Politics and Policy*. 3<sup>rd</sup> Edition. Congressional Quarterly. Washington, DC.

Upton, C. & Bass, S. 1995. *The Forest Certification Handbook*. Earthscan, London.

Valentinus. A & Counsell, S. 2002. PT. Diamond Raya Timber, Indonesia Case Study 9. Dalam: *Trading in Credibility: The Myth and Reality of the Forest Stewardship Council*. S. Counsell and K. Loraas (eds). Rainforest Foundation UK, Hal. 136-143.

Van Assen, B.W. 2005. Kasus Diamond Raya Timber: Abadikah berlian? *E-Label (Jurnal Sertifikasi Ekolabel)*. Edisi III (September 2005): 59-66.